

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PROGRAM BSPS PADA MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DI
DESA KARANG SARI.**

**DEVELOPMENT COMMUNICATION STRATEGY AS THE
IMPLEMENTATION OF THE BSPS PROGRAM IN LOW-INCOME
COMMUNITIES IN KARANG SARI VILLAGE.**

¹⁾Indah Talabyah,²⁾Cut Alma Nurafiah,³⁾Muya Syaroh Iwanda Lubis
^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas dharmawangsa

Jl. Kl. Yos Sudarso NO.224 Medan

*Email: cutalamanurafiah@dharmawangsa.ac.id, muyasyarohiwalubis@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Mengetahui strategi komunikasi pembangunan yang digunakan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni sebagai implementasi program BSPS di Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun (2) untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Berlokasi di Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Informan dalam penelitian berjumlah tiga belas orang, terdiri dari tiga orang fasilitator, PPK BSPS, Kordinator Kabupten dan Ketua Tim Verifikasi Wilayah I sebagai perwakilan dari tim BSPS, empat orang masyarakat penerima bantuan yang menjalankan program BSPS dan tiga orang dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan. Teknik pengambilan data melalui proses wawancara menggunakan panduan wawancara (semi terstruktur), observasi dan penelusuran dokumen. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman, dimulai dengan reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan sebagai implementasi program BSPS berhasil terlaksana dengan adanya kebijakan yang dijalankan bersama dengan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga implementasi program BSPS berjalan dengan baik dengan adanya sumber daya manusia yang lebih berkompeten. Faktor penghambat pelaksanaan program ini adalah pembangunan yang belum selesai pada waktunya karena penerima bantuan tidak menyadari pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam pembangunan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Pembangunan, Implementasi Program BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

ABSTRACT

To determine the development communication strategies used in empowering community welfare in improving the quality of livable housing as an implementation of the BSPS program in Karang Sari Village, Gunung Maligas District, Simalungun Regency (2) to determine the factors that inhibit the implementation of the BSPS program in Karang Sari Village, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. Located in Karang Sari Village, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. The informants in the study numbered thirteen people, consisting of three

facilitators, the BSPS PPK, the District Coordinator and the Head of the Region I Verification Team as representatives of the BSPS team, four community members receiving assistance who are running the BSPS program and three people from the community who did not receive assistance. The data collection technique was through an interview process using an interview guide (semi-structured), observation and document searches. The data analysis technique used the Miles & Huberman model, starting with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the development communication strategy as part of the BSPS program implementation was successfully implemented through policies implemented in conjunction with communication in community empowerment. This resulted in the successful implementation of the BSPS program, supported by the availability of more competent human resources. A hindering factor in the program's implementation was the untimely completion of construction projects due to a lack of awareness among aid recipients of the importance of cooperation and communication in development.

Keywords: *Development Communication Strategy, BSPS Program Implementation, Low-Income Communities (MBR)*

A.PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menekankan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana penerima bantuan tidak hanya memperoleh dukungan material, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui prinsip swadaya, gotong royong, dan kolaborasi dalam proses pembangunan rumah. Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat penerima manfaat.

Dalam perspektif komunikasi pembangunan, komunikasi merupakan instrumen penting untuk menyampaikan informasi, membangun partisipasi masyarakat, serta menciptakan kesepahaman dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, memperkuat kepercayaan kepada pemerintah, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, rendahnya partisipasi, bahkan konflik dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Desa Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu wilayah penerima Program BSPS Tahun Anggaran 2023.

Meskipun program telah dilaksanakan sesuai ketentuan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami mekanisme program secara utuh, rendahnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong, serta masih terdapat persepsi bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan beberapa rumah mengalami keterlambatan dan belum selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai implementasi Program BPSPS umumnya lebih banyak membahas aspek implementasi kebijakan, efektivitas penyaluran bantuan, dan evaluasi administrasi program. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis strategi komunikasi pembangunan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program masih relatif terbatas, terutama pada konteks masyarakat pedesaan. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kurangnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif komunikasi pembangunan dengan implementasi kebijakan BPSPS dalam membangun partisipasi masyarakat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh fasilitator, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program BPSPS. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk komunikasi yang digunakan, tetapi juga mengkaji bagaimana komunikasi tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat, koordinasi antarpelaksana, serta penyelesaian berbagai hambatan dalam implementasi program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pembangunan dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi pembangunan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program BPSPS di berbagai daerah.

B. LANDASAN TEORI

1. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan proses penyampaian informasi yang dirancang untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun partisipasi, kolaborasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai tujuan program, hak dan kewajiban sebagai penerima manfaat, serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Harun dan Ardianto (2017), komunikasi pembangunan merupakan proses pertukaran informasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang direncanakan melalui partisipasi masyarakat. Sementara itu, Nasution (1996) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan

membentuk perilaku masyarakat agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), komunikasi pembangunan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, koordinasi, serta edukasi yang dilakukan oleh fasilitator kepada masyarakat. Keberhasilan komunikasi tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, tumbuhnya budaya gotong royong, serta terciptanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting setelah suatu kebijakan ditetapkan. Pada tahap ini, kebijakan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya, melakukan koordinasi, serta membangun komunikasi dengan kelompok sasaran.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan **Van Meter dan Van Horn** yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. standar dan sasaran kebijakan;
2. sumber daya;
3. komunikasi dan koordinasi antarorganisasi;
4. karakteristik organisasi pelaksana;
5. kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta
6. disposisi atau sikap pelaksana.

Model ini relevan untuk menganalisis pelaksanaan Program BSPS karena mampu menjelaskan hubungan antara komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antaraktor dalam mencapai tujuan program. Implementasi yang efektif akan menghasilkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengelola potensi yang dimiliki, mengambil keputusan secara mandiri, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Menurut Korten (1992), pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan kemampuan, partisipasi, dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Mardikanto dan Soebianto (2017) menambahkan bahwa pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki kemampuan memecahkan permasalahan secara berkelanjutan.

Dalam Program BSPS, pemberdayaan diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan rumah. Pendekatan swadaya dan gotong royong menjadi ciri utama program sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan rumah layak huni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Implementasi Program BSPS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Karang Sari telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan komunikasi, yaitu sosialisasi program, verifikasi calon

penerima, pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pelaksanaan pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang dilakukan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, pemerintah desa, tim verifikasi, TFL, dan kelompok penerima bantuan sehingga informasi mengenai mekanisme program dapat disampaikan secara berjenjang kepada masyarakat.

Bentuk komunikasi yang diterapkan didominasi oleh komunikasi tatap muka melalui sosialisasi, musyawarah desa, koordinasi antarpelaksana, dan pendampingan selama proses pembangunan rumah. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan program, persyaratan penerima bantuan, serta tanggung jawab penerima dalam menyelesaikan pembangunan rumah secara swadaya. Komunikasi yang intensif juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa, fasilitator, dan masyarakat sehingga pelaksanaan program berjalan lebih terarah.

Temuan ini sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen untuk membangun partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program sehingga tujuan pembangunan lebih mudah dicapai.

Implementasi Program BSPS

Implementasi Program BSPS telah mengacu pada ketentuan Kementerian PUPR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penentuan calon penerima bantuan. Proses dimulai dari usulan pemerintah desa, verifikasi oleh tim terkait, penetapan penerima oleh Kementerian PUPR, hingga pendampingan pembangunan oleh TFL. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menjalankan program.

Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi berjalan cukup efektif sehingga mampu mendukung pelaksanaan program. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh TFL membantu masyarakat memahami prosedur pembangunan rumah dan penggunaan bantuan secara tepat.

Faktor Pendukung Implementasi

Keberhasilan pelaksanaan Program BSPS didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, fasilitator, dan kelompok penerima bantuan sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat diterima secara jelas. Kedua, budaya gotong royong masyarakat masih menjadi modal sosial yang mendukung proses pembangunan rumah. Ketiga, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN telah disalurkan sesuai mekanisme sehingga tidak ditemukan keterlambatan pencairan dana. Keempat, pendampingan intensif dari TFL membantu masyarakat menyelesaikan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor Penghambat Implementasi

Meskipun secara umum program berjalan baik, penelitian menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan utama adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme Program BSPS sehingga muncul anggapan bahwa bantuan hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong belum merata sehingga beberapa pembangunan rumah mengalami keterlambatan.

Keterbatasan keterampilan tenaga tukang, kondisi cuaca, serta koordinasi yang belum optimal pada beberapa kelompok penerima juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi komunikasi pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program BPS di Desa Karang Sari. Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, pendampingan, dan monitoring mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan program sekaligus mendorong partisipasi dalam proses pembangunan rumah. Temuan ini mendukung teori komunikasi pembangunan yang menegaskan bahwa komunikasi merupakan instrumen utama dalam menciptakan perubahan sosial melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat.

Dari perspektif implementasi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan program dibandingkan faktor lainnya. Komunikasi yang efektif memperkuat koordinasi antarinstansi, memperjelas pembagian tugas, serta mengurangi potensi kesalahpahaman antara pelaksana dan masyarakat. Sebaliknya, ketika komunikasi kurang optimal, partisipasi masyarakat menurun dan proses pembangunan menjadi kurang efektif.

Penelitian ini juga memberikan temuan bahwa keberhasilan Program BPS tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibangun, tetapi juga dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui prinsip swadaya dan gotong royong. Dengan demikian, strategi komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan perumahan. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi pembangunan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program BPS sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat penerima manfaat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **strategi komunikasi pembangunan** memiliki peran yang penting dalam mendukung implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Strategi komunikasi yang diwujudkan melalui sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta monitoring oleh pemerintah desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program serta mendorong partisipasi penerima bantuan dalam proses pembangunan rumah. Komunikasi yang efektif juga memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi Program BSPS masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap

tujuan program, belum optimalnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, serta faktor cuaca yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program BSPS tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kualitas pendampingan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah dan pelaksana program perlu memperkuat strategi komunikasi pembangunan melalui sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan kapasitas fasilitator, serta penguatan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Dengan demikian, Program BPS tidak hanya mampu meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batoebara, M.U (2020). *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Medan: Undhar Press
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Budi Utama
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Unoversitas Gajah Mada
- Edwards III, George C.(2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Korten, D. C. (1992) *People-Centred Development: Alternative for a World in Crisis*, dalam Kenneth E. Bauzon(ed). *Development and Democration in the third world: Mytbs, Hopes And Realities* Washington: Crane Russak.
- Harun, R. dan Ardianto, E. (2017). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Depok: Rajawali Pers.
- Indradin dan Irwan. (2016). *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardikanto, T. dan Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nuraflah, C.A. (2019). Model Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Islam. Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Pratko, Riyono. 1986. Komunikasi Pembangunan. Bandung: Alumni Rousydiy, Lathief. 1989. Rhetorica, Komunikasi & Informasi. Medan : Rimbaw

Sholeh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Bandung: Fokusmedia.

Sayogyo. (2000). Kemiskinan dan Indikator kemiskina. Gramedia Jakarta

Siabert, F.S. Peterson. T. & Schramm, W. 1956: Four Theorist of the press. Urbana: University of Illinois Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sutopo, H.B, 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori& Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Pers.

Wahab, Solichin Abdul 2014 Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara

Jurnal :

Bawenti, J. R., Singkoh, F.C., & Kimbal, A. (2019) Implementasi Program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2.

Ferida, I (2020). Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 1-13.

Nuraflah, C.A.(2019).Peran Masyarakat sebagai Komunikator Pembangunan.

Jurnal Ilmu Komunikasi,5(2), 96-104

Safrida, Dewi H. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pabdemi Covid 19. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 8(1), 34- 45.

Sinaga, K. (2021). Pembangunan Berkelanjutan untuk Pencegahan Kebencanaan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 1, 72-78.

Suradi. (2012)Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Ekonomi, Vol: 17 (3).

Skripsi :

Brilian, Cahyaning Brilian. (2017). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya).

Herlina, Dewi. (2021). Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. (Ekonomi Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).

Sumber Lain :

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2023, December 8). Tugas dan Fungsi PUPR. Pu.Go.Id

Iryanto Sirait, ST. ,M. Si. (2023). Mekanisme dan Panduan Kerja Pemilihan Terbuka Toko.

Kementerian PUPR. (2018). PermenPUPR07-2018.

Kementrian PUPR. (2022). 3. Lampiran II BSPS-BSPS Sejahtera - SE No 14- SE-Dr-2022.

Kementerian PUPR. (2022). Permen PUPR 7 tahun 2022_Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Kartasasmita, Ginandjar. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi nasional yang Tangguh Dan Mandiri, makalah disampaikan pada seminar nasional lembaga pembinaan pengusahaan kecil menengah dan koperasi (LP2MK GOLKAR) Jakarta, 7 November 1996